

BAB III
PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DIBARAK MILITER RESIMEN INDUK DAERAH MILITER III
SILIWANGI BERDASARKAN SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA
BARAT NO.43/PK.03.04/KESRA JAWA BARAT

A. Gambaran Umum Barak Resimen Induk Daerah Militer III Siliwangi Jawa Barat

Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi yang secara administratif berada di bawah Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Markas utama satuan ini beralamat di Jalan Menado No. 4, Kota Bandung, sedangkan salah satu satuan pendidikan dan pelatihan lapangan yang menjadi fokus penelitian berada di kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan pelatihan lapangan yang sering dimanfaatkan tidak hanya untuk pendidikan militer, tetapi juga untuk kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk program pembinaan anak dan remaja berbasis kedisiplinan.⁴¹

Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi (Rindam III/Siliwangi) merupakan satuan pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan prajurit. Tugas pokok satuan ini meliputi penyelenggaraan pendidikan dasar militer, pelatihan lanjutan, serta pembinaan kemampuan prajurit agar memiliki kesiapan fisik, mental, dan intelektual yang memadai. Dalam konteks organisasi TNI AD, Rindam memiliki posisi strategis karena menjadi tempat pembentukan karakter dasar prajurit sebelum ditempatkan di satuan operasional.⁴²

Secara historis, keberadaan Rindam III/Siliwangi tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Divisi Siliwangi yang merupakan salah satu kekuatan militer utama di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Divisi Siliwangi dibentuk pada tahun 1946 dan memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan negara, khususnya di wilayah Jawa Barat. Perkembangan organisasi militer tersebut

⁴¹ Resimen Induk Daerah Militer III Siliwangi, “*Membina Dan Melatih Prajurit Yang Handal Untuk NKRI*”, (Diakses 15 Maret 2026.).

⁴² Resimen Induk Daerah Militer III Siliwangi, 'Op.cit'.

kemudian melahirkan berbagai satuan, termasuk lembaga pendidikan militer yang pada akhirnya berkembang menjadi Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi.

Perkembangan kelembagaan Rindam III/Siliwangi menunjukkan adanya dinamika organisasi yang cukup signifikan. Pada awalnya, lembaga pendidikan militer di lingkungan Kodam III/Siliwangi mengalami beberapa perubahan bentuk dan nomenklatur. Berdasarkan Surat Keputusan Pangdam VI/Siliwangi pada tahun 1976, satuan ini secara resmi menggunakan nama Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), dengan hari jadi yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 1960. Selanjutnya, melalui proses reorganisasi TNI AD, pada tahun 1991 ditetapkan kembali sebagai Rindam III/Siliwangi yang dikenal hingga saat ini.

Struktur organisasi Rindam III/Siliwangi terdiri atas beberapa satuan pendidikan (Satdik) yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Pangalengan, Bogor, dan wilayah Banten. Setiap satuan pendidikan memiliki fungsi spesifik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan militer. Salah satu lokasi penting dalam struktur tersebut adalah kawasan pelatihan di Cikole, Lembang, yang difungsikan sebagai pusat latihan lapangan, pembinaan fisik, serta pengembangan karakter berbasis kedisiplinan. Lokasi ini sering digunakan dalam berbagai kegiatan pelatihan karena memiliki kondisi geografis yang mendukung.

Kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik geografis yang khas, yaitu berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.200–1.400 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikenal memiliki suhu yang relatif sejuk serta dikelilingi oleh kawasan hutan pinus yang luas. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sangat ideal untuk kegiatan pelatihan fisik, pembinaan mental, serta aktivitas yang membutuhkan ketahanan dan kedisiplinan tinggi. Selain itu, lingkungan yang relatif jauh dari pusat keramaian juga memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap aktivitas peserta selama mengikuti program pembinaan.⁴³

⁴³ Resimen Induk Daerah Militer III Siliwangi, 'Op,cit'.

Fasilitas yang tersedia di lingkungan Rindam III/Siliwangi, khususnya di kawasan Cikole, cukup lengkap dan mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan. Fasilitas tersebut meliputi barak sebagai tempat tinggal peserta, lapangan latihan untuk kegiatan fisik dan baris-berbaris, ruang kelas untuk kegiatan pendidikan formal, serta sarana pendukung lainnya seperti aula, ruang makan, dan fasilitas kesehatan. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa Rindam tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan militer, tetapi juga sebagai institusi pendidikan yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, dan intelektual dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.⁴⁴

Sebagai bagian dari Kodam III/Siliwangi, Rindam memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam mencetak prajurit TNI AD yang profesional. Namun dalam perkembangannya, fungsi Rindam tidak hanya terbatas pada pendidikan militer, tetapi juga meluas ke dalam kegiatan pembinaan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi fungsi tersebut adalah keterlibatan Rindam dalam program pembinaan generasi muda, termasuk penanganan kenakalan remaja melalui pendekatan kedisiplinan. Hal ini menunjukkan adanya transformasi peran institusi militer dalam mendukung kebijakan sosial pemerintah.

Keterlibatan Rindam III/Siliwangi dalam program pembinaan anak juga mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi militer. Pemerintah daerah memanfaatkan sistem pelatihan dan kedisiplinan militer sebagai sarana pembentukan karakter, sementara pihak militer menyediakan fasilitas dan metode pembinaan yang terstruktur. Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yang bersifat lintas sektor dalam menangani permasalahan sosial, khususnya kenakalan remaja.

Secara keseluruhan, Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi di kawasan Cikole, Lembang merupakan lokasi yang memiliki karakteristik khusus baik dari aspek historis, struktural, maupun geografis. Keunggulan tersebut menjadikan

⁴⁴ Resimen Induk Daerah Militer III Siliwangi, 'Op,cit'.

lokasi ini relevan sebagai tempat pelaksanaan program pembinaan berbasis kedisiplinan. Selain itu, keberadaan fasilitas yang memadai serta sistem pelatihan yang terstruktur menjadikan Rindam III/Siliwangi sebagai objek penelitian yang representatif dalam mengkaji pelaksanaan pembinaan anak melalui pendekatan semi-militer dalam perspektif hukum perlindungan anak.

B. Tujuan Program Pembinaan

Program pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi pada dasarnya dirancang sebagai suatu bentuk intervensi pendidikan yang bersifat komprehensif dalam rangka membentuk karakter peserta didik, khususnya yang terindikasi memiliki permasalahan kedisiplinan dan perilaku menyimpang. Program ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya penertiban semata, melainkan sebagai proses pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang. Dalam konteks kebijakan publik, program ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons fenomena kenakalan remaja yang semakin kompleks, dengan mengintegrasikan pendekatan pendidikan karakter, kedisiplinan, serta pembinaan mental melalui metode semi-militer. Hal ini sejalan dengan kebijakan daerah yang memanfaatkan pendekatan pembinaan berbasis kedisiplinan sebagai solusi alternatif dalam menangani perilaku menyimpang remaja.⁴⁵

Secara substantif, tujuan utama dari program pembinaan ini adalah untuk membentuk peserta didik agar memiliki karakter yang kuat, yang tercermin dalam sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran sosial sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara. Pembentukan karakter tersebut dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai dasar yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kepatuhan terhadap norma, kemampuan mengendalikan diri, serta penghargaan terhadap aturan dan otoritas. Pendekatan ini selaras dengan

⁴⁵ Gubernur Jawa Barat, '*Surat Edaran Gubernur Jawa Barat*', (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2025), hlm,1.

konsep pendidikan karakter yang menekankan pentingnya pembentukan moral dan kepribadian peserta didik sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.⁴⁶ Program ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku eksternal, tetapi juga menysasar aspek internal berupa pola pikir (*mindset*) dan sikap mental peserta.

Lebih lanjut, tujuan program pembinaan ini dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kedisiplinan dan Kepatuhan terhadap Norma Sosial melalui Pola Pembinaan Terstruktur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap norma sosial. Kedisiplinan dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan individu untuk menaati aturan yang berlaku secara konsisten, baik dalam lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan jadwal kegiatan yang ketat, latihan fisik seperti baris-berbaris, serta pembiasaan hidup tertib dan teratur menjadi metode utama dalam membentuk perilaku disiplin tersebut. Praktik ini juga tercermin dalam pelaksanaan program pembinaan di barak militer yang menekankan rutinitas dan keteraturan sebagai sarana pembentukan karakter.⁴⁷

2. Penanaman Nilai-Nilai Bela Negara dan Nasionalisme dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara dan nasionalisme. Pendidikan bela negara dalam program ini tidak hanya dimaknai sebagai kesiapan fisik untuk mempertahankan negara, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya peran individu sebagai bagian dari bangsa. Peserta diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Penanaman nilai tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk karakter warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara.⁴⁸

⁴⁶ “Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025”.

⁴⁷ Gubernur Jawa Barat, ‘*Op.cit*’, hlm,2.

⁴⁸ Kemhan_RI, “*Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*”,(2015).hlm, 95.

3. Pembentukan Karakter Mandiri dan Bertanggung Jawab sebagai Tujuan Pembinaan

Program ini memiliki tujuan untuk membentuk karakter mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengambil keputusan, mengelola waktu, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pola kehidupan yang terstruktur dan disiplin dalam program pembinaan mendorong peserta untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sehingga terbentuk sikap mandiri yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.⁴⁹

4. Upaya Preventif dan Represif dalam Mengurangi Perilaku Menyimpang Remaja

Program pembinaan ini bertujuan untuk mengurangi sekaligus mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, keterlibatan dalam geng motor, penyalahgunaan alkohol, hingga kecanduan game secara berlebihan menjadi latar belakang utama dilaksanakannya program ini. Pembinaan yang intensif dan terarah diharapkan mampu mengubah pola perilaku peserta menjadi lebih positif dan konstruktif. Program pembinaan berbasis barak militer di Jawa Barat sendiri secara eksplisit ditujukan untuk menangani siswa dengan perilaku menyimpang tersebut.⁵⁰

5. Penguatan Ketahanan Mental dan Emosional sebagai Bagian dari Pembinaan Karakter

Program ini juga bertujuan untuk membentuk ketahanan mental dan emosional peserta didik. Ketahanan mental merupakan aspek penting dalam perkembangan remaja, mengingat pada fase ini individu menghadapi berbagai

⁴⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

⁵⁰ Gubernur Jawa Barat, ‘*Op.cit*’, hlm,2.

tekanan dari lingkungan sosial, keluarga, maupun internal dirinya. Kegiatan fisik yang terstruktur, pelatihan mental, serta pembinaan karakter yang intensif diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola emosi dan menghadapi tekanan secara rasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembinaan yang menekankan aspek mental dan psikologis sebagai bagian integral dari pendidikan karakter.⁵¹

Dapat dipahami bahwa tujuan program pembinaan ini tidak bersifat tunggal atau parsial, melainkan mencakup berbagai dimensi yang saling terintegrasi, yaitu dimensi kedisiplinan, moral, sosial, dan psikologis. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya represif dalam menanggulangi kenakalan remaja, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang, serta fungsi rehabilitatif dalam memperbaiki dan membentuk kembali karakter peserta didik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program pembinaan ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pendekatan alternatif dalam sistem pembinaan anak, yang mengedepankan pembentukan karakter melalui metode yang terstruktur dan berbasis kedisiplinan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program

Mekanisme pelaksanaan program pembinaan di lingkungan Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi pada dasarnya dirancang secara bertahap, sistematis, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, orang tua, serta institusi militer. Pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara langsung tanpa prosedur, melainkan melalui tahapan seleksi dan pertimbangan tertentu guna memastikan bahwa peserta yang mengikuti program benar-benar merupakan individu yang membutuhkan pembinaan khusus. Mekanisme ini juga mencerminkan adanya upaya

⁵¹ "Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah".

untuk tetap memperhatikan aspek perlindungan anak melalui keterlibatan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan.

1. Identifikasi Peserta

Identifikasi peserta merupakan tahap awal dalam mekanisme pelaksanaan program pembinaan. Proses ini dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya melalui guru dan guru bimbingan konseling (BK), dengan mengacu pada perilaku siswa yang menunjukkan indikasi kenakalan atau pelanggaran disiplin yang berulang. Kriteria peserta umumnya mencakup siswa yang terlibat dalam tawuran, geng motor, penyalahgunaan alkohol, serta perilaku menyimpang lainnya yang sulit ditangani melalui mekanisme pembinaan sekolah biasa. Prioritas juga diberikan kepada siswa yang dinilai sudah tidak dapat dibina secara optimal oleh orang tua maupun lingkungan sekolah. Proses identifikasi ini menunjukkan bahwa program pembinaan tidak ditujukan untuk seluruh siswa, melainkan hanya bagi kelompok tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

2. Seleksi Administratif

Tahap selanjutnya adalah seleksi administratif yang bertujuan untuk memastikan kelayakan peserta secara formal sebelum mengikuti program pembinaan. Seleksi ini dilakukan melalui koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, serta instansi terkait di tingkat daerah. Dalam proses ini, data peserta dikumpulkan dan diverifikasi, termasuk riwayat pelanggaran, latar belakang keluarga, serta kondisi sosial peserta. Selain itu, dalam beberapa pelaksanaan program, peserta juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan kondisi psikologis guna memastikan kesiapan fisik dan mental sebelum mengikuti pembinaan di barak. Pemeriksaan ini menjadi penting karena program pembinaan melibatkan aktivitas fisik dan mental yang cukup intensif⁵².

⁵² Kompas.com, 'Materi Pendidikan Siswa Bermasalah Di Barak Militer: Baris-Berbaris Hingga Pembinaan Mental', 2025, Diakses 28 Maret 2026.< [Program pembinaan karakter dan disiplin untuk anak berkonflik dengan hukum di barak militer Halaman 1 - Kompasiana.com](#)>.

3. Persetujuan Orang Tua

Persetujuan orang tua atau wali merupakan aspek krusial dalam mekanisme pelaksanaan program pembinaan. Keikutsertaan peserta dalam program ini tidak bersifat paksaan, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Keterlibatan orang tua menunjukkan bahwa program ini tetap memperhatikan prinsip partisipasi keluarga dalam pengasuhan anak, serta menghindari pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kesepakatan ini biasanya dilakukan melalui komunikasi formal antara pihak sekolah dan orang tua, yang kemudian menjadi dasar administratif bagi pelaksanaan program. Mekanisme ini secara tegas ditegaskan oleh pihak TNI bahwa penentuan peserta harus berdasarkan persetujuan bersama antara sekolah dan orang tua.

4. Penempatan di Barak

Tahap akhir dalam mekanisme pelaksanaan program adalah penempatan peserta di barak militer, khususnya di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Cikole, Lembang. Penempatan ini dilakukan setelah seluruh tahapan sebelumnya terpenuhi, termasuk identifikasi, seleksi administratif, dan persetujuan orang tua. Dalam beberapa kasus, peserta dijemput langsung oleh pihak terkait untuk kemudian ditempatkan di lokasi pembinaan. Selama berada di barak, peserta mengikuti program pembinaan yang telah disusun secara khusus, yang mencakup kegiatan kedisiplinan, pendidikan karakter, serta pelatihan mental dan fisik. Durasi pelaksanaan program dapat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan karakter dan bela negara, bukan sebagai pendidikan militer dalam arti pelatihan tempur.⁵³

Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan melibatkan

⁵³ Kompas.com, 'Materi Pendidikan Siswa Bermasalah Di Barak Militer: Baris-Berbaris Hingga Pembinaan Mental', 2025, Diakses 28 Maret 2026.< [Program pembinaan karakter dan disiplin untuk anak berkonflik dengan hukum di barak militer Halaman 1 - Kompasiana.com](#)>.

berbagai pihak secara aktif. Mekanisme ini tidak hanya menekankan aspek kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan aspek administratif, psikologis, serta persetujuan keluarga sebagai bagian dari prinsip perlindungan anak. Struktur pelaksanaan yang demikian mencerminkan bahwa program pembinaan ini merupakan bentuk intervensi sosial yang dirancang secara sistematis dalam rangka menangani kenakalan remaja melalui pendekatan yang terintegrasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan militer.

D. Sistem Pembinaan Yang Diterapkan

Sistem pembinaan yang diterapkan dalam program pembinaan di lingkungan Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi merupakan suatu sistem yang dirancang secara terpadu dengan mengombinasikan pendekatan kedisiplinan semi-militer, pelatihan fisik dan mental, pendidikan karakter, serta integrasi dengan pendidikan formal. Sistem ini tidak berdiri sendiri sebagai pola pelatihan militer murni, melainkan merupakan bentuk adaptasi metode militer ke dalam kerangka pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Penerapan sistem tersebut dilakukan secara terstruktur melalui kurikulum khusus yang disusun oleh pemerintah daerah bersama institusi terkait guna memastikan bahwa proses pembinaan tetap berada dalam koridor pendidikan dan perlindungan anak.

1. Kedisiplinan Semi-Militer

Kedisiplinan semi-militer merupakan dasar utama dalam sistem pembinaan yang diterapkan. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan aturan yang ketat, jadwal kegiatan yang terstruktur, serta pola kehidupan yang menuntut kepatuhan terhadap tata tertib. Peserta didik dibiasakan untuk mengikuti kegiatan secara tepat waktu, menjaga kerapian, serta menaati instruksi yang diberikan oleh pelatih. Sistem ini bertujuan untuk membentuk pola perilaku disiplin melalui pembiasaan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari di barak. Program ini secara eksplisit dirancang sebagai pendidikan karakter dan kedisiplinan, bukan sebagai pelatihan militer

dalam arti tempur, sehingga aspek yang ditekankan adalah pembentukan sikap dan perilaku, bukan kemampuan militer.⁵⁴

2. Latihan Fisik dan Mental berdasarkan latar belakang

Latihan fisik dan mental merupakan bagian integral dalam sistem pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jasmani dan psikologis peserta didik. Kegiatan fisik yang diberikan meliputi olahraga rutin, latihan baris-berbaris, serta aktivitas lain yang bertujuan meningkatkan kebugaran tubuh dan daya tahan fisik. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat dan disiplin. Pembinaan mental dilakukan melalui kegiatan motivasi, pembentukan sikap, serta penanaman nilai tanggung jawab dan pengendalian diri. Kombinasi antara latihan fisik dan mental ini diharapkan mampu membentuk keseimbangan antara kekuatan jasmani dan ketahanan psikologis peserta. Program pembinaan di barak militer sendiri dilaksanakan secara intensif selama periode tertentu, seperti dua minggu, dengan fokus pada pembinaan disiplin dan tanggung jawab.

Lebih lanjut penanganan dengan berbagai kategori disana dilakukan dengan berbeda, untuk segi usia dianggap sama karena peserta yang mengikuti kegiatan adalah anak yang berusia antara 15-18 tahun, bukan anak dibawah 15 tahun dengan metode latihan fisik dan mental yang tentu berbeda, latar belakang anak juga menjadi variabel penting dalam menentukan bentuk pembinaan. Anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau minim pengawasan memerlukan pendekatan yang lebih menekankan pada pembinaan emosional dan dukungan psikologis. Anak yang melakukan pelanggaran karena pengaruh lingkungan pergaulan memerlukan pendekatan yang berfokus pada pembentukan karakter dan kemampuan menolak tekanan kelompok (*peer pressure*). Dalam konteks ini, program pembinaan di barak militer harus mampu mengakomodasi perbedaan latar belakang tersebut, sehingga tidak menggunakan pendekatan yang seragam (*one size fits all*).

⁵⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, '*Tentang Bela Negara*', 2025.

3. Pendidikan Karakter berdasarkan usia anak

Pendidikan karakter menjadi inti dari keseluruhan sistem pembinaan yang diterapkan. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam program ini mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, serta rasa cinta tanah air. Pendidikan karakter diberikan melalui berbagai metode, baik secara langsung melalui penyampaian materi maupun secara tidak langsung melalui pembiasaan perilaku sehari-hari. Program ini juga mengacu pada nilai-nilai filosofis yang dikembangkan dalam kebijakan daerah, seperti konsep pembentukan pribadi yang sehat, berperilaku baik, berintegritas, cerdas, dan memiliki inisiatif. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar peserta tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵

4. Integrasi Pendidikan Formal di Lingkungan Rindam III/Siliwangi

Integrasi pendidikan formal dalam program pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan Rindam III Siliwangi merupakan aspek fundamental yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hak pendidikan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembinaan. Program pembinaan yang dilaksanakan tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan formal, melainkan mengadopsi dan mengintegrasikan proses pembelajaran akademik ke dalam pola pembinaan yang bersifat disiplin dan terstruktur. Pelaksanaan integrasi ini dilakukan melalui koordinasi antara pihak penyelenggara pembinaan, sekolah asal, serta instansi pendidikan terkait di tingkat daerah.

Penyelenggaraan pendidikan formal di lingkungan pembinaan dilakukan dengan menyesuaikan materi ajar terhadap kurikulum yang berlaku di sekolah asal peserta didik. Materi pembelajaran disampaikan secara terjadwal dengan memperhatikan keterbatasan waktu serta intensitas kegiatan pembinaan fisik dan mental. Metode pembelajaran yang digunakan cenderung

⁵⁵ Kompas.com, 'Materi Pendidikan Siswa Bermasalah Di Barak Militer: Baris-Berbaris Hingga Pembinaan Mental', 2025, Diakses 28 Maret 2026.< [Program pembinaan karakter dan disiplin untuk anak berkonflik dengan hukum di barak militer Halaman 1 - Kompasiana.com](#)>.

bersifat fleksibel dan adaptif, dengan penekanan pada mata pelajaran inti agar peserta didik tidak mengalami ketertinggalan signifikan dalam aspek akademik. Guru atau tenaga pendidik dapat berasal dari sekolah asal maupun difasilitasi melalui koordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Pelaksanaan integrasi pendidikan formal juga didukung oleh pengaturan waktu yang proporsional antara kegiatan pembinaan dan kegiatan belajar. Jadwal harian peserta didik disusun sedemikian rupa sehingga terdapat alokasi waktu khusus untuk mengikuti kegiatan akademik, baik dalam bentuk pembelajaran langsung maupun penugasan mandiri. Sistem ini memungkinkan peserta didik untuk tetap terlibat dalam proses pendidikan formal meskipun berada di lingkungan pembinaan yang bersifat non-konvensional.

Keterlibatan sekolah asal menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Sekolah tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan perkembangan akademik serta memberikan materi atau tugas yang harus diselesaikan selama masa pembinaan. Koordinasi yang berkelanjutan antara pihak sekolah dan penyelenggara pembinaan menjadi mekanisme utama dalam menjaga sinkronisasi antara program pembinaan dan sistem pendidikan formal.

Selain itu, integrasi pendidikan formal dalam program pembinaan di Rindam III Siliwangi juga melibatkan peran pemerintah daerah melalui dinas pendidikan serta lembaga terkait lainnya. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional serta tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai peserta didik. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembinaan disiplin dan pemenuhan hak pendidikan.

E. Keterlibatan Para Pihak

Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan program pembinaan di lingkungan Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan program. Program ini tidak dilaksanakan secara parsial oleh satu institusi, melainkan melalui sinergi lintas

sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta orang tua peserta didik. Kolaborasi tersebut mencerminkan pendekatan multidimensional dalam menangani kenakalan remaja, yang mengintegrasikan aspek kebijakan publik, pendidikan, serta pembinaan sosial.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai inisiator dan pengambil kebijakan utama dalam pelaksanaan program pembinaan. Kebijakan ini dituangkan melalui instrumen administratif berupa surat edaran gubernur yang menjadi dasar hukum operasional program. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan tujuan pembinaan dan tidak menyimpang dari prinsip perlindungan anak. Program pendidikan karakter berbasis barak militer sendiri merupakan bagian dari kebijakan daerah dalam merespons meningkatnya kenakalan remaja dengan pendekatan alternatif berbasis kedisiplinan dan pembinaan karakter.

2. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pelaksana teknis yang mengoordinasikan implementasi program di tingkat pendidikan. Peran ini meliputi identifikasi dan seleksi peserta didik yang memenuhi kriteria, penyusunan kurikulum pembinaan, serta pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan formal selama program berlangsung. Peserta program umumnya merupakan siswa yang direkomendasikan oleh sekolah melalui guru atau bimbingan konseling (BK), sehingga menunjukkan adanya mekanisme seleksi berbasis kebutuhan pendidikan dan perilaku peserta didik.

3. Sekolah

Sekolah memiliki peran sebagai institusi awal yang mengidentifikasi dan merekomendasikan peserta didik untuk mengikuti program pembinaan. Guru dan tenaga pendidik, khususnya guru Bimbingan dan Konseling (BK), berperan dalam melakukan asesmen terhadap perilaku siswa serta menentukan apakah siswa tersebut memerlukan intervensi khusus melalui program

pembinaan di barak militer. Sekolah juga tetap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pendidikan akademik peserta didik dengan melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara program agar tidak terjadi keterputusan proses belajar. Keterlibatan sekolah menunjukkan bahwa program ini tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan formal, bukan sebagai mekanisme di luar sistem pendidikan.

Peran sekolah dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dalam menentukan kelayakan peserta didik yang akan mengikuti program pembinaan di Rindam III Siliwangi. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan indikator perilaku menyimpang, seperti pelanggaran tata tertib sekolah yang berulang, keterlibatan dalam kenakalan remaja, serta penurunan kedisiplinan yang signifikan. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar rekomendasi yang diajukan kepada pihak terkait, baik orang tua maupun instansi pemerintah daerah, untuk dipertimbangkan dalam program pembinaan lanjutan.

Ruang lingkup sekolah yang siswanya dapat direkomendasikan mengikuti pembinaan pada umumnya mencakup satuan pendidikan tingkat menengah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga termasuk dalam kategori ini, mengingat karakteristik peserta didiknya yang berada pada rentang usia remaja 15–18 tahun. Lingkup tersebut menunjukkan bahwa sasaran program pembinaan lebih difokuskan pada remaja yang berada dalam fase perkembangan krusial, sehingga intervensi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan dampak korektif dan preventif secara optimal.

Sekolah yang telah mengirim siswanya untuk mengikuti pembinaan di Rindam III Siliwangi yaitu sekolah SMAN 23 Negeri Bandung sebanyak 28 siswa meliputi gelombang pertama 10 orang, dan gelombang 2 meliputi 18 siswa, SMAN 25 Bandung dengan total siswa 32 orang, gelombang pertama 12 orang, dan gelombang 2 ada 20 orang, SMKN 9 Bandung dengan total 35 siswa, gelombang pertama ada 18 orang, dan gelombang 2 ada 17 orang.

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Daerah Jawa Barat

TNI Angkatan Jawa barat, berperan sebagai pelaksana pembinaan di lapangan. Peran tersebut mencakup penyediaan fasilitas, tenaga pelatih, serta penerapan metode pembinaan berbasis kedisiplinan semi-militer. Keterlibatan TNI dalam program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan fokus pada pembentukan karakter, peningkatan kedisiplinan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan institusi TNI, sehingga menegaskan bahwa peran TNI bersifat kolaboratif dan tidak berdiri secara mandiri.

Pelaksanaan pembinaan tersebut didukung oleh beberapa satuan dan lokasi strategis yang berada dalam lingkup TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi yang berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, berfungsi sebagai pusat utama pembinaan dalam skala besar. Fasilitas ini digunakan untuk menampung dan membina siswa tingkat SMA dan SMK yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Kapasitas dan sarana yang tersedia memungkinkan pelaksanaan program pembinaan secara terstruktur, intensif, dan terintegrasi.

Mako Rindam III/Siliwangi yang berada di Kota Bandung digunakan secara khusus untuk pelaksanaan pembinaan bagi siswa yang berasal dari wilayah Kota Bandung. Penggunaan fasilitas ini menunjukkan adanya pendekatan berbasis wilayah guna mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua peserta didik. Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha Kostrad di Kabupaten Purwakarta juga difungsikan sebagai lokasi pembinaan bagi puluhan siswa tingkat SMP dan SMA dari wilayah tersebut. Keterlibatan satuan ini memperluas cakupan program pembinaan sehingga tidak terpusat pada satu lokasi saja, melainkan tersebar sesuai kebutuhan daerah. Divisi Infanteri 1 Kostrad yang berlokasi di Cilodong, Kota Depok, berperan sebagai pusat pembinaan bagi sekitar pelajar dari wilayah Kota Depok. Fasilitas ini dimanfaatkan sebagai markas pembinaan dengan

pendekatan kedisiplinan dan pembentukan karakter yang serupa dengan lokasi lainnya.

Pengembangan program pembinaan ke depan menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas penggunaan fasilitas militer sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Penambahan markas atau satuan yang terlibat dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya tampung peserta serta memperluas jangkauan wilayah pembinaan di Provinsi Jawa Barat. Rencana tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan institusi TNI dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menangani permasalahan kenakalan remaja secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Keberadaan berbagai lokasi pembinaan tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan anak di barak militer dilaksanakan secara sistematis dan terdistribusi. Pendekatan ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas serta efektivitas dalam pelaksanaan pembinaan, sekaligus memperkuat sinergi antara institusi militer dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Integrasi lintas lembaga tersebut menegaskan bahwa program pembinaan tidak semata-mata berorientasi pada penegakan disiplin, melainkan juga pada pembentukan karakter dan reintegrasi sosial peserta didik secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan pihak TNI dalam kanal youtube Nusantara, khususnya pelatih dan pimpinan program pembinaan di lingkungan Rindam III/Siliwangi yaitu Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menunjukkan bahwa peran TNI dalam program ini difokuskan pada pelaksanaan pembinaan disiplin, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Narasumber menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan merupakan pelatihan militer dalam arti tempur, melainkan pendidikan karakter berbasis kedisiplinan.⁵⁶

⁵⁶ Nusantara TV, 'Barak Militer Ala KDM' (YouTube) <https://youtu.be/iDei_QNpRPk>. (Diakses, 02 Mei 2026, Pukul 14.39 WIB)

5. Orang Tua

Orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang memberikan persetujuan sekaligus dukungan terhadap keikutsertaan anak dalam program pembinaan. Partisipasi orang tua diwujudkan melalui persetujuan tertulis sebagai bentuk legitimasi bahwa program diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Orang tua juga tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan anak selama program berlangsung, termasuk melalui kunjungan secara berkala. Fakta menunjukkan bahwa peserta program merupakan siswa yang didaftarkan langsung oleh orang tua dengan persetujuan resmi, sehingga keterlibatan keluarga menjadi bagian integral dalam proses pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua peserta yaitu bapak Dadang yang beralamat diKp. Ciburial Rt 002 Rw 004, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang anaknya dikirim kebarak militer Rindam III Siliwangi, diperoleh keterangan bahwa sebagian besar orang tua mendukung pelaksanaan program pembinaan ini karena dianggap mampu memberikan perubahan perilaku pada anak. Orang tua menyatakan bahwa keputusan untuk mengikutsertakan anak dalam program dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi anak yang sulit dibina melalui pendekatan keluarga maupun sekolah.

6. Tahapan dan proses pembinaan penanganan anak berkonflik dengan hukum

Program pembinaan siswa bermasalah melalui barak militer di Jawa Barat dilaksanakan melalui prosedur administratif yang terstruktur, dimulai dari tahap identifikasi oleh pihak sekolah, asesmen perilaku siswa, hingga pemenuhan persyaratan administratif sebelum peserta resmi mengikuti program pendidikan karakter. Siswa yang direkomendasikan umumnya merupakan peserta didik yang tergolong melakukan pelanggaran berat atau berulang, seperti terlibat tawuran, geng motor, penyalahgunaan minuman keras, pergaulan bebas, kecanduan gim daring berlebihan, sering bolos, serta berbagai bentuk perilaku menyimpang lain yang dinilai sulit ditangani melalui pembinaan sekolah konvensional.

Proses identifikasi dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, kepala sekolah, serta dinas pendidikan melalui evaluasi terhadap riwayat pelanggaran, perilaku sosial, dan kondisi psikologis siswa. Setelah melalui evaluasi, orang tua atau wali murid diwajibkan memberikan persetujuan resmi melalui surat pernyataan tertulis. Surat persetujuan tersebut umumnya memuat identitas lengkap siswa dan orang tua, pernyataan kesediaan anak mengikuti program pembinaan karakter di barak militer, persetujuan terhadap tata tertib dan metode pembinaan, kesediaan orang tua untuk terlibat dalam evaluasi perkembangan anak, serta tanggung jawab keluarga dalam proses pembinaan lanjutan pasca program selesai. Dalam beberapa kasus, surat tersebut juga memuat pernyataan bahwa apabila orang tua menolak program, maka keluarga bertanggung jawab penuh atas pembinaan mandiri terhadap anak apabila terjadi pengulangan perilaku menyimpang.

Selain surat persetujuan, peserta diwajibkan melengkapi berbagai dokumen administratif seperti fotokopi Kartu Keluarga, KTP orang tua atau wali, kartu pelajar, surat rekomendasi sekolah, catatan pelanggaran siswa, surat keterangan sehat, hasil asesmen guru BK, serta pemeriksaan kesehatan fisik dan mental. Setelah seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap, peserta menjalani proses registrasi dan penempatan di lokasi pembinaan, seperti Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Resimen Induk Kodam III/Siliwangi, atau fasilitas militer lain yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Masa pembinaan umumnya berlangsung selama 14 hari hingga 60 hari, tergantung tingkat pelanggaran, kebutuhan pembinaan, serta kebijakan daerah setempat. Selama masa tersebut, siswa diwajibkan tinggal di lingkungan barak militer dengan sistem asrama penuh dan mengikuti jadwal kegiatan yang disiplin sejak pagi hingga malam hari. Program pembinaan mencakup pendidikan kedisiplinan, latihan baris-berbaris, pembinaan mental dan karakter, wawasan kebangsaan, bela negara, pendidikan agama, konseling psikologis, pengembangan kepemimpinan, serta kegiatan sosial dan keterampilan produktif. Sebagai contoh, peserta dibiasakan bangun pagi, mengikuti apel, olahraga rutin, pembelajaran etika, kerja sama kelompok, hingga refleksi

perilaku untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Seluruh kebutuhan peserta, termasuk tempat tinggal, konsumsi, seragam, serta materi pembinaan, ditanggung oleh pemerintah daerah sehingga orang tua tidak dibebankan biaya langsung.

Setelah masa pembinaan selesai, peserta menjalani tahap evaluasi akhir yang dilakukan oleh pembina militer, tenaga pendidik, serta pihak sekolah untuk menilai perkembangan perilaku, tingkat kedisiplinan, perubahan karakter, dan kesiapan siswa kembali ke lingkungan sosial maupun pendidikan formal. Evaluasi ini biasanya mencakup laporan perkembangan harian, observasi sikap, serta rekomendasi tindak lanjut. Siswa yang dinilai telah menunjukkan perubahan positif kemudian dikembalikan kepada orang tua dan sekolah asal untuk melanjutkan pendidikan dengan pengawasan lanjutan dari keluarga dan guru BK. Tahap pasca pembinaan ini menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial, karena sekolah dan keluarga diharapkan tetap melakukan pendampingan agar perubahan perilaku yang telah terbentuk selama masa pembinaan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.⁵⁷

⁵⁷ Kompas.com, 'Materi Pendidikan Siswa Bermasalah Di Barak Militer: Baris-Berbaris Hingga Pembinaan Mental', 2025, Diakses 28 Maret 2026.< [Program pembinaan karakter dan disiplin untuk anak berkonflik dengan hukum di barak militer Halaman 3 - Kompasiana.com](#)>.